

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Temuan penelitian tentang permasalahan terlaksananya fungsi pengelolaan keuangan Program KB pada Dinas PPKBP3A Kabupaten Banyumas maka dapat disimpulkan yaitu pengelolaan keuangan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Banyumas belum terlaksana secara sistematis, disebabkan sistem perencanaan kegiatan dan anggaran yang bersifat *topdown*, sehingga menyebabkan kendala dalam melaksanakan penggunaan anggaran karena penyerapan anggaran yang tidak optimal yang disebabkan seringkali ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas kelompok sasaran akibat dari fungsi pengelolaan anggaran yang sistematis.

Secara rinci berdasarkan aspek kajian fungsi pengelolaan keuangan yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta sistem pertanggungjawaban pelaksanaan program, sebagai berikut.

1. Perencanaan anggaran Program KB pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Sub bagian Perencanaan bersifat *topdown*, sehingga seringkali menimbulkan kendala utama yang sering terjadi yaitu penyerapan anggaran yang tidak optimal karena adanya ketidaksesuaian volume dan jenis alokasi Dana BOK. adanya perbedaan Standar Satuan Harga antara Pusat dan Daerah, perencanaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas setiap wilayah sasaran, Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA). Perencanaan dilakukan oleh Sub bagian Perencanaan. Pemerintah Pusat menghitung kebutuhan anggaran melalui target-target yang ingin dicapai. Proses perencanaan anggaran KB di daerah juga tidak melibatkan PLKB, IMP, Bidan atau lainnya.

2. Pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan pengelolaan dana BOKB berkaitan dengan sistem perencanaan yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang tidak tercapai dalam Program KB di Kabupaten Banyumas disebabkan oleh perencanaan yang kurang sesuai sasaran, diantaranya perencanaan waktu, volume kegiatan dan realisasi transfer anggaran. Penerimaan atau distribusi anggaran dilakukan oleh Sub Bagian Keuangan dengan terlebih dahulu mengajukan anggaran melalui NPD, dan apabila pembayaran dilakukan melalui transfer, maka akan dilakukan pembayaran transfer oleh Bendahara. Hasil pengelolaan BOKB mencapai output yang belum maksimal, penyerapan belum sesuai target outcome hal ini disebabkan karena kebijakan di setiap wilayah berbeda sehingga dampaknya tidak mempengaruhi langsung dengan kepesertaan berKB yang menjadikan keluarga yang berkualitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengadaan yang diharuskan, melakukan koordinasi langsung dengan bagian keuangan bila terjadi permasalahan anggaran dan upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mendukung kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program KB untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

3. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi telah dilakukan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan Program KB Kabupaten Banyumas, baik pada tahap perencanaan maupun tahap penggunaan anggaran terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan; realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan. Pengawasan pelaksanaan Pengawasan dan evaluasi dilakukan dalam dua jenis pengawasan yaitu pengawasan internal dari mulai dokumen diterima di Kabupaten, disusun dan di verifikasi awal di bidang sebelum diserahkan di bagian keuangan. Pengawasan dan evaluasi dilakukan melalui *cross check* ketidaksesuaian dari pelaksanaan hasil laporan dan evaluasi di keuangan, dan dilakukan dari pengajuan anggaran kegiatan, waktu penyelenggaraan dan

pelaksanaan kegiatan sampai dengan pembuatan dokumen dan pengiriman dokumen ke kabupaten. Pengawasan penggunaan anggaran eksternal dilakukan oleh APIP, Inspektorat, BPK, bahkan dapat dilakukan oleh KPK. Feed Back yang dilakukan masyarakat adalah dapat difasilitasinya penggerakan pelayanan KB.

4. Sistem pertanggungjawaban

Sistem pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk penyampaian laporan kegiatan dan penggunaan anggaran oleh semua tingkatan pengelolaan, setiap bulan (awal bulan pada bulan berikutnya). Sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan program KB di Kabupaten Banyumas: Laporan keuangan di tingkat daerah sudah sesuai petunjuk dokumen pelaporan secara lengkap dengan bukti-bukti pendukung, namun pada tingkat desa/kecamatan/faskes masih belum secara menyeluruh pelaporannya dikerjakan dengan baik. Penyampaian laporan masih menghadapi kendala (baik kegiatan, waktu yang ada dan SDM).

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang menjelaskan adanya beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan Program KB di Kabupaten Banyumas, maka perlu disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. DPPKBP3A Kabupaten Banyumas perlu model perencanaan kegiatan dana perencanaan keuangan yang lebih mengakomodasikan kebutuhan prioritas sasaran program dengan memodifikasi model perencanaan *top down* dengan perencanaan *bottom up*. Sehingga dapat memastikan perencanaan didasarkan pada informasi dan data aktual yang dibutuhkan dan menjadi prioritas yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran program KB.
2. DPPKBP3A Kabupaten Banyumas perlu melakukan Perencanaan keuangan Program KB berbasis data yang aktual sehingga diperoleh dokumen perencanaan yang dapat diimplementasikan secara efektif.

3. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan peningkatan literasi pengelolaan keuangan pada tenaga pengelola BOKB melalui kegiatan bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan manajemen keuangan.
4. Perlu adanya peningkatan motivasi kerja tenaga lini lapangan dengan memberikan pembinaan secara berkelanjutan dan upaya meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian stimulan yang lebih baik.

